

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Studi Di Kota Sintang Kabupaten Sintang

Herry Surya Alfiadi

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

Email: galaxy_xx@yahoo.com

Abstrak

Sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit dan menurunnya estetika. Faktor keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah sepenuhnya akan tergantung pada kemauan Pemerintah Daerah dan kesadaran masyarakat tentang artinya lingkungan bersih. Kemauan ini dapat dimulai dari pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sektor pengelolaan sampah sebagai salah satu pencerminan keberhasilan pengelolaan kota. Kenyataan menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam Program Kebijakan Penanganan Sampah, diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah sementara. Fokus dari artikel ini adalah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah yang didekati dengan studi kasus di Kota Sintang Kabupaten Sintang. Penelitian ini bermaksud menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah yaitu, program kebijakan, sasaran kebijakan, unsur pelaksana (implementor) dan faktor lingkungan. Saran penulis mengenai sasaran program yaitu masyarakat agar dapat diberi penyuluhan dan sosialisasi mengenai penanganan sampah di lingkungan masing-masing. Unsur pelaksana dalam hal ini Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang agar dapat menambah sumber daya manusia dan fasilitas penunjang lain dalam penanganan sampah.

Kata Kunci : Penanganan Sampah, Sasaran Kebijakan, Unsur Pelaksana.

Abstrack

Residual waste that is part of human activity needs to be managed properly so as not to cause problems to human life or environmental disturbances such as environmental pollution, the spread of disease and reduced aesthetics. Success factors in the implementation of waste management will entirely depend on the willingness of Local Government and community awareness about the environment means clean. This willingness can be started from an understanding and awareness of the importance of waste management sector as one reflection of the successful management of the city. The fact is there are still some obstacles in the Waste Management Policy Program, including lack of public awareness to dispose of waste in place and the lack of facilities landfills while. The focus of this article are the factors that affect the implementation of waste management policies are approached with a case study in City Sintang. The results of this study indicate that there are four factors that affect the implementation of waste management policy, namely, policy programs, policy objectives, implementing elements (implementor) and environmental factors. The authors suggested that the program targets communities in order to be given counseling and discussions on waste management in their respective environments. Implementing elements in this department cleanliness, landscaping and fire Sintang in order to increase human resources and other support facilities in waste handling.

Keywords : Waste Management, Policy Targets, Managing Elements.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor perekonomian pada sebuah kota memicu timbulnya arus urbanisasi yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan pada sektor perumahan dan permukiman. Dengan berkembangnya wilayah permukiman, penyediaan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung berfungsinya sebuah wilayah yang juga mengalami pertumbuhan mengikuti arah perkembangan pembangunan. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang tidak dapat mengimbangi dari pertumbuhan pembangunan akan berdampak terhadap munculnya kekumuhan pada wilayah tersebut.

Munculnya permukiman kumuh di perkotaan merupakan sebuah permasalahan yang sering dihadapi sejumlah kota besar di Indonesia. Minimnya penyediaan sarana dan prasarana di permukiman kumuh umumnya dilatar belakangi oleh permasalahan legalitas permukiman tersebut, sehingga berdampak kepada lingkungan. Sebagai contoh, dengan tidak tersedianya sarana prasarana persampahan maka masyarakat akan cenderung mencemari lingkungan, permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah perkotaan yang kurang baik.

Sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit. Pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal.

Dewasa ini persampahan telah menjadi agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia. Faktor keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah sepenuhnya akan tergantung pada kemauan Pemerintah Daerah dan kesadaran masyarakat tentang artinya lingkungan bersih. Kemauan ini dapat dimulai dari pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sektor pengelolaan sampah sebagai salah satu pencerminan keberhasilan pengelolaan kota.

Selama melakukan penelitian penulis melihat masalah-masalah di lapangan mengenai masyarakat Kabupaten Sintang dalam penanganan sampah masih sangat kurang optimal karena dapat dilihat dari, tempat pembuangan sampah (TPS) yang tidak seimbang, Jadwal pembuangan sampah belum dilakukan secara optimal Masyarakat, Kurangnya armada yang bertugas, Pembuangan sampah yang

tidak pada tempatnya seperti tanah kosong, bantaran sungai, dengan jumlah penduduk Kabupaten Sintang. Maka dari itu Dinas Kebersihan Kabupaten Sintang harus memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kebutuhan lingkungan, dan kurangnya petugas kebersihan dalam penanganan sampah yang terhitung perharinya yang menghasilkan sampah setiap hari dari masyarakat Kabupaten Sintang sehingga masih banyak sampah yang bertumpuk di Tempat Pembuangan Sampah.

Peneliti juga melihat dari sisi kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan sangat minim karena masyarakat masih kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga sampah-sampah banyak berserakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemerintah harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang arti pentingnya lingkungan sehat dan bersih demi keberlangsungan hidup.

B. KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH

Kebijakan Penanganan Sampah adalah salah satu contoh kebijakan publik yang di ambil oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002 : 27.28).

Ada beberapa teori tentang kebijakan di antaranya yaitu; menurut Titmuss (1958:12) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik. Studi mengenai pembuatan kebijakan publik merupakan studi yang sangat penting dalam administrasi negara. Prinsip tersebut akan ditinjau lebih lanjut dari kebijakan publik sendiri menurut para ahli. Menurut H. Hugh Heglo

(dalam Abidin 2004:21) kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Anderson (dalam Islamy, 1997:4) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public* (dalam Agustino 2006:139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:

"Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya"

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai "Out come" (hasil akhir) kegiatan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut "Policy delivery system" (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Wahab, 1990:123-124).

Menurut Smith (dalam buku Tachjan, 2008:37-39), dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu di perhatikan, keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan yang bisa menyebabkan timbul protes-protes, bahkan aksi fisik dimana hal ini menghendaki penegaksn instusi-instusi baru untuk mewjutkan sasaran kebijakan tersebut. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu antara lain :

1. Program (kebijakan) yang di laksanakan.
2. *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapak akan

menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.

3. Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implemantasi tersebut.
4. Faktor lingkungan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta dilapangan. Fokus penelitian ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domain (domain analysis), merupakan analisis domain (bidang) dilakukan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain; Kepala Bidang Oprasional Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang, Bapak Wahyu Hidayat, Staf lapangan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang yaitu Bapak Hendra dan seorang warga yaitu Ibu Yohana.

Tujuan penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah di kota sintang kabupaten sintang.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KOTA SINTANG KABUPATEN SINTANG

Menurut Smith (dalam buku Tachjan, 2008:37-39), dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu di perhatikan, keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan yang bisa menyebabkan timbul protes-protes, bahkan aksi fisik dimana hal ini menghendaki penegaksn instusi-instusi baru untuk mewjutkan sasaran kebijakan tersebut. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu antara lain ; Program (kebijakan) yang di laksanakan. *Target groups* (sasaran kebijakan), Unsur pelaksana (*implementor*), dan Faktor lingkungan. Berdasarkan teori tersebut, penulis meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah di kota sintang kabupaten sintang sebagai berikut;

1. Program yang diluncurkan dalam penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang.

Program yang dilakukan dalam penanganan sampah yang dilakukan dinas kebersihan kabupaten sintang mengajak warga berpartisipasi dalam penanganan sampah serta melakukan sosialisasi dan memberi arahan kepada warga untuk keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara penanganannya, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi, keterlibatan masyarakat menikmati hasil dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program yang akan dilakukan dalam penanganan sampah di Kota Sintang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum program yang dilakukan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang Kota Sintang dalam penanganan sampah antara lain.

1. sosialisasi dampak terhadap sampah
2. penambahan TPS
3. Penambahan Armada serta
4. perluasan TPA.

Program penanganan sampah merupakan salah satu program yang dimana selalu melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatannya. Tahapan pelaksanaan program pengelolaan sampah adalah, di setiap rumah tangga disediakan dua jenis tempat sampah plastik, yang pertama untuk sampah non-organik yang bisa dijadikan produk kerajinan dan yang kedua untuk sampah non-organik yang tidak bisa dibuat produk kerajinan tetapi memiliki nilai jual. Semakin tinggi tingkat partisipasi, maka keberhasilan program pengelolaan sampah juga semakin tinggi.

Wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang, Bapak Wahyu Hidayat (34 tahun), beliau mengatakan: *"..program penanganan sampah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sintang saya rasa cukup baik dan ideal, mengingat permasalahan sampah di Kota ini memang sudah sangat mendesak untuk segera diatasi, program yang sudah cukup, segala sesuatunya*

telah ada aturannya, misalnya mengenai jadwal pembuangan sampah, penyediaan tempat pembuangan sementara dan lain sebagainya.." wawancara diatas menunjukkan bahwa kebijakan penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang sudah ideal untuk menangani masalah sampah di Kota Sintang.

Berkaitan dengan wawancara tersebut di atas penulis melakukan wawancara dengan staf lapangan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang, Bapak Hendra, (37 tahun) beliau menyatakan *"..penanganan sampah di Kota Sintang sekarang ini saya rasa sudah cukup baik dan teratur semenjak ada kebijakan penanganan sampah yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, pekerjaan kami di lapangan juga merasa lebih dimudahkan karena dengan adanya kebijakan ini masyarakat sepertinya lebih sadar untuk mengelola sampah.."* Wawancara diatas menunjukkan program penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang cukup efektif untuk menimbulkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam menangani masalah sampah di Kota Sintang.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu warga, ibu Yohana (40 tahun) mengatakan: *"..sebagai masyarakat awam menurut saya semenjak ada program penanganan sampah, keadaan lingkungan sudah lumayan baik lah, penanganan sampah sudah mulai tertata dan terjadwal, tempat pembuangan sampah sementara juga sudah mulai banyak tersebar jadi kita tidak susah mencari tempat buang sampah yang dekat rumah.."*wawancara di atas menunjukkan bahwa kebijakan penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat.

Hasil ketiga wawancara di atas menunjukkan bahwa manfaat yang paling dirasakan oleh warga setelah dilaksanakannya program ini adalah bertambahnya pengetahuan dalam pengelolaan sampah. Sebelum ada program warga memang tahu bahwa sampah bisa dimanfaatkan, tapi mereka tidak mempunyai keterampilan untuk mengelolanya, setelah ada program ini. Warga menjadi mampu mengelola sampah rumah tangga, manfaat selanjutnya yang dirasakan oleh warga adalah program ini dapat menjadi ajang bersosialisasi bersama warga lain, selanjutnya yang dirasa setelah ada program pengelolaan sampah adalah lingkungan menjadi lebih bersih karena sampah bisa dikelola dengan baik. Sebelum ada program banyak warga yang membakar sampah, namun sekarang

pembuangan sampah menjadi lebih teratur sehingga program ini juga membantu membuat lingkungan menjadi lebih indah dan sehat.

2. Sasaran program dalam penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang.

Pembangunan perkotaan merupakan suatu wilayah yang perlu diperhatikan dalam segala hal baik sektor pertumbuhan penduduk maupun sektor pertumbuhan perekonomian dan pada sebuah kota memicu timbulnya arus urbanisasi yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan pada sektor perumahan dan permukiman warga, namun dalam konteks ini ada suatu permasalahan yang perlu kita sadari bahwa dampak bahaya yang ditimbulkan sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar yaitu penanganan sampah yang ada di kota sintang yang perlu diperhatikan dalam lingkungan. Adapun Sasaran program yang akan dilakukan salah satu dalam penanganan sampah antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi masyarakat dan pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan peraturan perundang-undangan secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
2. Meningkatkan koordinasi masyarakat dan pelaku usaha untuk berperan aktif dalam mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan SDA;
3. Meningkatkan dan komunikasi lingkungan untuk membangun kesepahaman dan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
4. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan;
5. Meningkatkan prasarana dan sarana persampahan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan persampahan.

Wawancara dengan Kepala Bidang Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang bapak Wahyu Hidayat (34 tahun), beliau mengatakan: *“...sasaran program penanganan sampah ini cukup luas, misalnya mengajak pengusaha untuk turut serta aktif mengelola sampah dihasilkan mereka sendiri, mengajak warga masyarakat untuk mengolah sampah dilingkungan sekitarnya, kalau masih ada yang bisa didaur ulang atau dimanfaatkan lagi lebih baik disisihkan, kita harap masyarakat sekarang lebih sadar akan kebersihan dan kesehatan lingkungan tempta tinggalnya..”* Wawancara di

atas menunjukkan bahwa sasaran program penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang adalah untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

Berkaitan dengan wawancara tersebut di atas, penulis melakukan wawancara dengan staf lapangan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang, Bapak Hendra, (37 tahun) beliau menyatakan *“..kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sangat penting, dengan adanya kebijakan penanganan sampah ini masyarakat diberi penyuluhan bagaimana memilih dan mengolah sampah dengan baik, kami sebagai staf di lapangan juga turut memberi arahan pada masyarakat bagaimana membuat tempat penampungan sampah sementara, bagaimana mendaur ulang sampah yang masih bisa dimanfaatkan, sejauh ini menurut saya program ini cukup berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga..”* Wawancara diatas menunjukkan bahwa sasaran program penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang salah satunya adalah memberi penyuluhan pada masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu warga, ibu Yohana (40 tahun) mengatakan : *“..kami memang mendapat penyuluhan dan bimbingan untuk mengolah sampah, memanfaatkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan, sekarang dilingkungan tempat tinggal saya sudah jauh lebih bersih, warga bergotong royong membersihkan parit dan membangun tempat pembuangan sampah yang dananya dari pemda, jadi masyarakat sekarang sudah sadar buang sampah harus ditempat yang disediakan..”* Wawancara diatas menunjukkan bahwa sasaran program kebijakan penanganan sudah cukup baik menysasar pada masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat dapat mengelola sampah di lingkungan masing-masing.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sasaran program penanganan sampah salah satunya adalah masyarakat dan pelaku usaha, bagaimana masyarakat dan pelaku usaha dapat mengolah sendiri sampah dihasilkan dari aktivitasnya. Terutama penyuluhan pada masyarakat bagaimana mengeloa sampah dengan baik di lingkungan masing-masing. Secara umum sasaran kebijakan penanganan sampah

di Kota Sintang Kabupaten Sintang sudah cukup baik.

3. Unsur pelaksanaan (implementor) dan pengawasan dalam penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang.

Pemerintah daerah dan aparat terkait sebagai unsur pelaksana harus memperhatikan pelayanannya, petugas sebagai pelaksana kebijakan di lapangan harus memiliki sikap disiplin, keterampilan dan pengetahuan tentang pengolahan sampah, dengan demikian diharapkan program penanganan masalah sampah dapat berjalan dengan baik. Kebijakan yang dilakukan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kebekaran Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dalam penanganan sampah berupa penanganan yang baik dilakukan seperti penyediaan tempat sampah, serta memberi sosialisasi terhadap pembuangan sampah pada tempatnya.

Wawancara dengan Kepala Bidang Oprasional Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang bapak Wahyu Hidayat (34 tahun), beliau mengatakan : *"..petugas dilapangan yang melaksanakan program kebijakan penanganan sampah ini saya rasa sudah cukup baik, petugas pengangkut sampah cukup disiplin mengangkut sampah tepat waktu, petugas yang memberi penyuluhan pada masyarakat juga cukup terampil dan terlatih bagaimana mengedukasi masyarakat tentang sampah dan kebersihan lingkungan.."* Wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang sudah cukup baik dan terampil dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Berkaitan dengan wawancara tersebut di atas penulis melakukan wawancara dengan staf lapangan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang, Bapak Hendra, (37 tahun) beliau menyatakan *"..selama ada kebijakan ini kami petugas di lapangan sudah diberi arahan dan panduan dengan jelas, bahkan kami diberi pelatihan khusus dalam penanganan beragam jenis sampah, mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah industri, berkat pelatihan tersebut tugas-tugas yang akan kami lakukan dapat kami pahami dengan baik.."* wawancara di atas menunjukkan bahwa para petugas pelaksana kebijakan penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang cukup

terampil dan terlatih dalam melaksanakan tugas yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu warga, ibu Yohana (40 tahun), mengatakan : *"..kami merasa selama program penanganan sampah dilaksanakan petugas yang ada sudah cukup baik, ramah dan mau berbagi pengetahuan bagaimana cara mengolah sampah, mereka juga datang sesuai jadwal untuk memberikan penyuluhan untuk warga, namun sampah yang ada di tempat pembuangan sementara masih ada beberapa yang menumpuk, karena petugas pengangkut sampah dan mobil pengangkut hanya datang sekali sehari.."* wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang sudah cukup baik dan dapat diterima masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, namun disisi lain kekurangan jumlah petugas dan armada pengangkut sampah.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam kebijakan pemerintah dalam mengatasi penanganan sampah di Kota sintang perlu di tingkatkan lagi jumlah petugas dan mobil pengangkut sampah, keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut perlu didukung adanya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.

4. Faktor lingkungan dalam penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang.

Pada hakatnya lingkungan merupakan tempat tinggal dimana semua aktivitas berlangsung. Dalam konteks ini lingkungan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam berkelangsungan hidup, adapun upaya dalam penanganan sampah merupakan hal yang perlu dijaga demi kesehatan karena sampah merupakan masalah pokok terhadap lingkungan sekitar kita dan perlu diatasi secara bersama demi kenyamanan bersama.

Wawancara dengan Kepala Bidang Oprasional Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang bapak Wahyu Hidayat (34 tahun), beliau mengatakan : *"..faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan program penanganan sampah ini, misalnya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai, ke parit atau ke lahan kosong, namun perlahan-lahan masyarakat kita berikan arahan dan penyuluhan tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan, bagaimana mengolah sampah yang masih bisa dimanfaatkan, terutama kaum ibu*

cukup antusias dengan program ini..” wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor lingkungan cukup berperan penting dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang.

Berkaitan dengan wawancara di atas penulis juga melakukan wawancara dengan staf lapangan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang, Bapak Hendra, (37 tahun) beliau menyatakan “...sebagai petugas di lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, kami akui faktor lingkungan cukup memengaruhi kinerja kami, misalnya warga yang tinggal di tepi sungai lebih senang membuang sampah ke sungai padahal sudah kami siapkan tempat pembuangan sampah sementara..” wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor lingkungan ternyata memang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang.

Selanjutnya mengenai wawancara tersebut di atas penulis juga melakukan wawancara dengan seorang warga ibu Yohana (40 tahun), mengatakan : “...selama ini masyarakat memang sudah terbiasa buang sampah di sembarang tempat, apalagi yang rumahnya jauh dari tempat pembuangan sementara, biasanya mereka buang sampah ke sungai atau ke lahan kosong, tapi sekarang sudah mulai berkurang yang buang sampah sembarangan, soalnya tempat pembuangan sementara sudah ada di mana-mana, selain itu ada penyuluhan bagi masyarakat, jadi kita juga sekarang malu kalau buang sampah sembarangan..” wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan terutama mengenai kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor lingkungan berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Sintang Kabupaten Sintang. Faktor kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai juga sulit untuk diberi penyuluhan. Faktor lingkungan berperan penting karena kondisi alam dan kebiasaan masyarakat yang turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penanganan sampah.

PENUTUP

Sasaran program dalam penanganan sampah di Kota Sintang belum optimal di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat, serta berpengaruh pada kuantitas maupun kualitas

penanganan sampah yang dihasilkan sehingga pada akhirnya apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan yang kurang baik.

Unsur pelaksana dalam hal ini Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang kurang memperhatikan masalah penanganan sampah rumah tangga yang kurang memperhatikan pelayanannya dalam sarana prasarana persampahan misalnya, Armada yang bertugas, TPS yang disediakan kurang memadai serta jumlah penduduk yang padat, untuk itu pemerintah lebih di optimalkan dalam memberi pelayanan yang memadai untuk penanganan sampah di Kota Sintang. Faktor lingkungan merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan karena sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup yang berada disekitar kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Wahab, solichshin (1997). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik* (Ahli Bahasa ;Riky Istamto), Jakarta : CV .Rajawali.
- Moleong, LExy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung* : Remaja Karya
- Miles. B. Matthew and Huberman. A . Michael (1992) *Analisa Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia Press (UI Press). Jakarta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarwoto. Otto. (1994). *Analisis Dampak Lingkungan*. Cetakan Keena. Gajah Mada Universitas Pres. Yogyakarta.
- Suprihatin. Agung dkk (1999) *Sampah Dan Pengelolanya*. Edisi Kedua. Penerbit PPGT/VEDC Malang bekerjasama dengan Swisscontact. Malang
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI.
- Richard M. Titmuss. 1958. *WeZfare State*. Crows Nest: Allen and Unwin, Ltd.,.